UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Studi Implementasi Kebijakan Wajib Sertifikat Kompetensi Kerja Pada Proyek Konstruksi di Kabupaten
Barito Selatan : Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**
RINA MARIANI, Dr. Agus Joko Pitoyo, S. Si., M.A ; Dr. Tauchid Komara Yuda, S. Sos., MDP
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi merupakan prasyarat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan wajib Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bagi tenaga kerja konstruksi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Namun, tingkat kepemilikan sertifikat kompetensi di Kabupaten Barito Selatan masih relatif rendah dibandingkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan wajib SKK pada proyek konstruksi di Kabupaten Barito Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi belum optimal, serta menganalisis pengaruh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap tenaga kerja konstruksi, badan usaha jasa konstruksi, dan pengguna jasa. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan regresi linear berganda serta model implementasi kebijakan Edward III.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib SKK secara umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Implementasi pada kelompok pengguna jasa dan badan usaha berada pada kategori baik hingga sangat baik, sedangkan pada tenaga kerja konstruksi masih berada pada kategori cukup. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan akses sertifikasi, biaya pelatihan dan sertifikasi, karakteristik tenaga kerja yang tidak tetap, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Secara simultan, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek kompleksitas penerapan dan keterbatasan akses terhadap sertifikasi.

Disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan wajib SKK memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan akses sertifikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, Sertifikat Kompetensi Kerja, Edward III, tenaga kerja konstruksi.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Studi Implementasi Kebijakan Wajib Sertifikat Kompetensi Kerja Pada Proyek Konstruksi di Kabupaten
Barito Selatan : Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**
RINA MARIANI, Dr. Agus Joko Pitoyo, S. Si., M.A ; Dr. Tauchid Komara Yuda, S. Sos., MDP
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

Improving the quality of construction human resources is an essential prerequisite for supporting high-quality, safe, and sustainable infrastructure development. The Government of Indonesia has established a mandatory Work Competency Certificate (Sertifikat Kompetensi Kerja/SKK) policy for construction workers through Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. However, the level of competency certification ownership in South Barito Regency remains relatively low compared to the number of available construction workers. This study aims to analyze the implementation of the mandatory SKK policy in construction projects in South Barito Regency, identify the factors contributing to its suboptimal implementation, and examine the influence of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure on policy implementation.

This study employed a quantitative approach using a survey method involving construction workers, construction service providers, and project owners. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistics, validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and Edward III's Policy Implementation Model.

The findings indicate that the implementation of the mandatory SKK policy has generally been carried out, but it has not yet reached optimal effectiveness. Implementation among project owners and construction companies was categorized as good to very good, while implementation among construction workers was only categorized as moderate. The main obstacles include limited access to certification services, training and certification costs, the temporary nature of construction employment, weak supervision, and insufficient coordination among stakeholders. Simultaneously, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure significantly influence policy implementation. Nevertheless, policy implementation continues to face challenges related to implementation complexity and limited access to certification.

It is concluded that the successful implementation of the mandatory SKK policy requires stronger institutional support, improved access to certification, and enhanced collaboration among stakeholders to increase the number of certified construction workers.

Keywords: policy implementation, Work Competency Certificate (SKK), Edward III, construction workforce.